

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

Oleh:
INTAN PUJI LESTARI
NIM. E01111082

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

E-mail: intan.pujilestari@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam pelaksanaan PNPM-MP pada tahun 2012 masih terdapat masyarakat yang tidak memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan PNPM-MP menyebabkan kurang berhasilnya kegiatan-kegiatan PNPM-MP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Teori yang digunakan untuk mengevaluasi PNPM-MP adalah dengan menggunakan kriteria evaluasi menurut Dunnyang bertujuan untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik yakni: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan PNPM-MP mencakup 3 bidang yaitu bidang lingkungan, bidang sosial dan bidang ekonomi. Adanya PNPM-MP dapat membantu pada tataran pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Karena kegiatan PNPM-MP dalam bidang lingkungan yang bisa ditangani dalam skala pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dalam skala yang kecil. Pada tahun 2012 tidak dilaksanakan kegiatan bidang sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan. Karena kegiatan pelatihan pada tahun 2011 hanya sebatas formalitas. Kegiatan PNPM-MP dalam bidang ekonomi yang berbentuk kegiatan pinjaman dana bergulir sudah dikelola dengan baik. Pinjaman dana bergulir hanya akan dipinjamkan dengan kelompok-kelompok yang sudah memiliki usaha. Pinjaman dana bergulir dijadikan modal usaha. Namun, masih ada beberapa KSM pinjaman dana bergulir yang menunggak. Saran yang dapat diberikan adalah semestinya kegiatan bidang ekonomi berbentuk pinjaman dana bergulir dengan pengembaliannya tidak berbunga.

Kata-kata Kunci: Evaluasi, PNPM-MP, Kriteria evaluasi, Bidang lingkungan, Bidang sosial, Bidang ekonomi

Abstract

The problem in this research is the implementation of PNPM-MP in 2012 that is since there are still people who do not understand either participate in the activities or events of PNPM-MP it caused the events of PNPM-MP was unsuccessful. The purpose of this research was to evaluate PNPM-MP in Kelurahan Bangka Belitung Laut. The theory that used to evaluate PNPM-MP is using evaluation criteria according to Dunn to measure the successful program or the public policy: effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and appropriateness. The method that used in this research is descriptive method, qualitative approach. The result of this research, showed the action of PNPM-MP was divided by 3 sectors: environment, social and economy. The existence of PNPM-MP can help the government officials, district and subdistrict because the action of PNPM-MP in environmental sector can be handled in scale of development that required by society in small scale. In 2012, there was no action in social sector in the form of training because the training activity in 2011 was only formality. The action of PNPM-MP in economic sector in the form of the loan of revolving fund is only for groups of people who have own business. The loan of revolving fund is being a modal to run a business. However, there are some KSM of the loan of revolving fund that are in overdue. The suggestion regarding this research in addition in economic sector about the loan of revolving fund should be not having interest in the repayment

Keywords: evaluation, PNPM-MP, evaluation criteria, environmental sector, social sector, economic sector.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan menjadi salah satu masalah di Kota Pontianak. Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata, padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks. Kemiskinan tidak hanya milik masyarakat di kawasan perdesaan yang pekerjaan di kawasan perdesaan lebih didominasi oleh petani, buruh tani, buruh dan nelayan. Tetapi kawasan perkotaan juga tidak lepas dari permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan bisa dilihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan.

Dalam menanggulangi kemiskinan di Kota Pontianak, pada tahun 2007 pemerintah telah membuat program penanggulangan kemiskinan perkotaan yang sarannya adalah masyarakat atau komunitas. Program penanggulangan kemiskinan perkotaan tersebut adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Adapun yang menjadi dasar hukum PNPM-MP adalah Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Peran PNPM-MP untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan tersebut, ditindaklanjuti oleh Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12

tahun 2012 tentang penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak dan Keputusan Walikota Pontianak No 31.1/Bappeda/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MP Kota Pontianak.

Kelurahan Bangka Belitung Laut mulai melakukan dan melaksanakan PNPM-MP sejak tahun 2009. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kelurahan Bangka Belitung Laut bernama Bangka Belitung Laut Abadi. BKM Bangka Belitung Laut Abadi menyusun PJM Pronangkis secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Bangka Belitung Laut secara mandiri.

Pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut telah melakukan beberapa kegiatan untuk menunjang dan meningkatkan kapasitas masyarakat di BKM Bangka Belitung Laut Abadi. Kegiatan PNPM-MP terbagi menjadi 3 bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu :ekonomi, program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh PNPM-MP adalah adanya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Dalam bidang ekonomi berbentuk bantuan pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat

(KSM). Untuk KSM yang telah terbentuk di BKM Bangka Belitung Laut pada tahun 2012 adalah 3 kelompok pemula dan 9 KSM lanjutan dari tahun sebelumnya.

Dibidang lingkungan yang difokuskan pada kegiatan infrastruktur. Kegiatan lingkungan yang telah terlaksana pada tahun anggaran 2012 adalah jalan rabat beton dan rehab rumah tidak layak huni. Namun ada beberapa kegiatan lingkungan tidak terlaksana seperti: perbaikan jalan cor gantung, pembangunan jalan gertak, pembuatan saluran drainase dan pembangunan MCK.

Pemanfaatan dana BLM dibidang sosial yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan yang dimaksudkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Jenis peningkatan kapasitas seperti pelatihan penguatan BKM/UP/Aparat kelurahan dan pelatihan keterampilan anggota dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terbentuk dan masih aktif agar mampu memperkuat dan mengembangkan kemampuan KSM. Namun pada tahun 2012, kegiatan sosial seperti pelatihan tersebut ditiadakan. Di sisi lain, tidak maksimalnya dalam melaksanakan kegiatan pelatihan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini

padakajian evaluasi PNPM-MP dalam menyelesaikan ketiga masalah tersebut menggunakan kriteria evaluasi disesuaikan dengan permasalahan PNPM-MP di setiap bidangnya.

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian sejenis dan meningkatkan khasanah disiplin ilmu dalam kebijakan publik bagi Studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya, yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan. Manfaat praktis dari penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu acuan dalam melaksanakan sebuah kebijakan atau program-program pemerintah dan sebagai salah satu bahan masukan untuk pihak pemerintah, khususnya Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM-MP yang melaksanakan PNPM Mandiri perkotaan dan meningkatkan pengetahuan peneliti tentang program nasional pemberdayaan pembangunan masyarakat perkotaan di Kota Pontianak

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Friedrich (dalam Agustino, 2012:7) adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok

atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

2. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Kusumanegara, 2012:121) berpendapat evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Sedangkan menurut Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2012:185) Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Nugroho (2006:157) evaluasi kebijakan publik memiliki fungsi untuk menilai evaluasi formulasi kebijakan publik, evaluasi implementasi kebijakan publik dan evaluasi lingkungan kebijakan publik. Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan.

Secara umum, menurut Dunn (2003:608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut:

a. Efektivitas

Istilah efektivitas merupakan kata yang tidak asing yang sering muncul dalam kajian Ilmu Administrasi Negara. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut William Dunn :Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternative mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya” (Dunn, 2003:429).

b. Efisiensi

Adapun menurut William Dunn mengemukakan bahwa:Efisiensi (*efficiency*)

berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. (Dunn, 2003:430).

c. **Kecukupan**

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Menurut William Dunn: kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn, 2003:430).

d. **Perataan**

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Menurut William Dunn bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn, 2003:434).

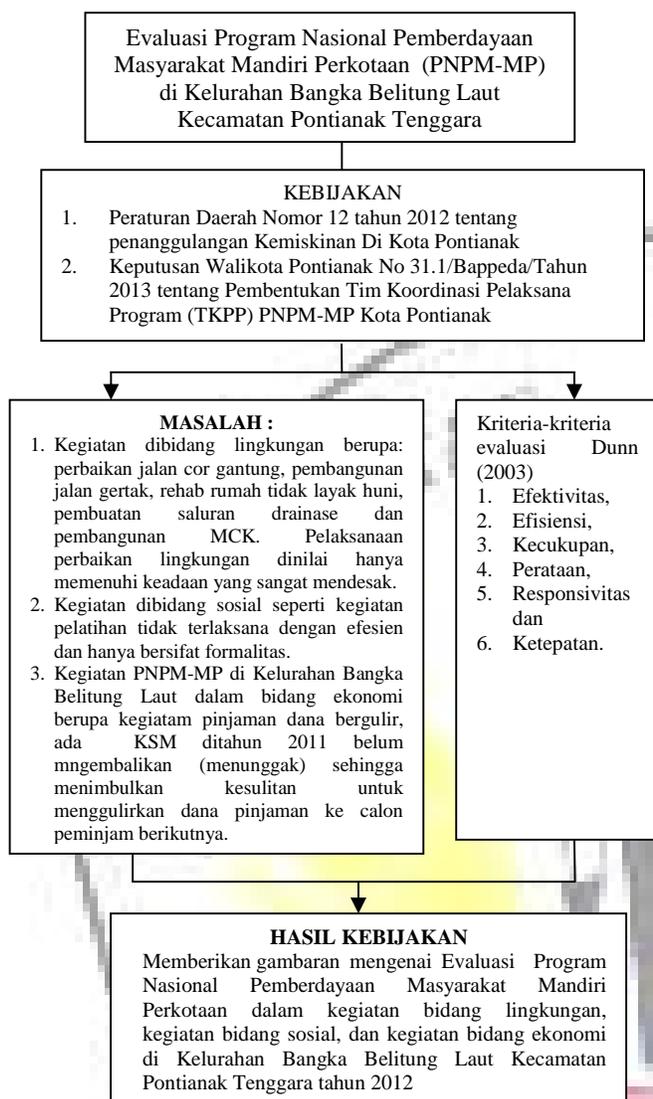
e. **Responsivitas**

Menurut William Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.

f. **Ketepatan**

Menurut William Dunn (2003:438), ketepatan berkenaan dengan berhubungan dengan rasionalitas substansif. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan menilai sebuah program dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan dan benar-benar berguna. Dalam mengevaluasi PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut menggunakan keenam kriteria evaluasi kebijakan publik.

3. Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: *Data diolah oleh peneliti pada tahun 2016*

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian inidigunakan untuk

menggambarkan fenomenayang terjadi dengan hasil data dilapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulanMaret 2015 hingga Januari 2016. Subjek dari penelitian ini adalah Koordinator PNPM-MP dan Assisten Koordinator PNPM-MP Kota Pontianak, Kasi Ekbang Kecamatan Pontianak Tenggara, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, Sekretaris, Unit Pengelola Keuangan, Unit Pengelola Lingkungan dan Unit Pengelola Sosial BKM Bangka Belitung Laut Abadi berjumlah 4 orang.(KSM) penerima PNPM-MP Kota Pontianak berjumlah 3 kelompok.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:91), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Untuk menganalisis

data-data dan informasi yang ada, peneliti menggunakan tiga tahap analisis data diantaranya: reduksi data, display data dan verifikasi. Mendekati suatu masalah secara langsung, dirasakan sulit apabila tanpa mengenal masalah tersebut secara umum. Analisis domain mampu mengatasi kesulitan ini. Teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran-gambaran objek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut (Bungin, 2001:293). Adapun untuk menguji validitas data, penulis menggunakan triangulasi sumber dan teknik yakni peneliti mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber atau informan yang diteliti dengan berbagai teknik diantaranya wawancara, observasi dan dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisa evaluasi PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, penulis menggunakan teori yang diungkapkan oleh William N. Dunn mengemukakan beberapa kriteria yang dapat mengevaluasi suatu program diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program yaitu:

efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

Evaluasi merupakan suatu tahapan kebijakan yang sangat krusial dan penting. evaluasi kebijakan yaitu apakah benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dihendaki. Agar suatu kebijakan yang dibuat dan telah dilaksanakan tersebut dapat dinilai berhasil atau tidak berhasil. Untuk mengevaluasi PNPM-MP merupakan menilai PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut dalam bentuk 3 bidang kegiatan atau tridaya yaitu :

1. Evaluasi PNPM-MP di Bidang Lingkungan

Untuk mengevaluasi berjalannya kegiatan bidang lingkungan menggunakan kriteria evaluasi Dunn yaitu efektivitas PNPM-MP bidang lingkungan di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Istilah efektivitas berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektivitas menurut Dunn (2003:429) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Dalam hal ini efektivitas kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Apakah telah dicapai ?. Yang berarti sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan atau pelaksanaan PNPM-MP telah dilaksanakan dengan baik atau

tidak. Berikut adalah wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Bapak "I" yang menjabat sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Pontianak Tenggara. Beliau mengatakan:

"Dengan adanya PNPM-MP ini cukup efisien dan sedikit banyak membantu pada tataran pemerintah kecamatan dan kelurahan. Karena di PNPM-MP ini kegiatan yang bisa ditangani hanya dalam skala pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dalam skala yang kecil". (Wawancara, 08 september 2015)

Dalam artian kegiatan-kegiatan pembangunan seperti infrastruktur atau perbaikan jalan yang ada di Kelurahan dalam skala yang kecil sehingga dapat ditangani oleh PNPM-MP. Dengan demikian, meskipun menggunakan dana yang minim, dana yang diberikan digunakan sebagai dana stimulan yang harus digunakan secara arif dan cermat dan ditetapkan berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat. Diharapkan dana ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk mampu memberi kontribusi dalam memberikan tenaga dan dana agar kegiatan ini menjadi lebih besar.

Selain efektivitas, kriteria evaluasi menurut Dunn yaitu: Ketepatan PNPM-MP bidang lingkungan Di Kelurahan Bangka

Belitung Laut. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan menilai sebuah program dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan dan benar-benar berguna. Untuk menilai ketepatan dari PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut menggunakan sesuai atau tidak pihak BKM dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan PNPM-MP.

Dalam strategi penanggulangan kemiskinan, kegiatan lingkungan mencakup meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman warga miskin di Kelurahan Bangka Belitung Laut seperti perbaikan infrastruktur lingkungan yaitu jalan, jembatan, saluran drainase, baru, sarana persampahan dan menciptakan rumah yang layak huni seperti memperbaiki rumah warga miskin di Kelurahan Bangka Belitung Laut yang non permanen sehingga bisa layak huni. Agar sesuai dengan tujuan PNPM-MP itu belum sepenuhnya tepat. Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak "B" yang menjabat sebagai koordinator BKM Bangka Belitung Laut mengenai ketepatan kegiatan lingkungan. Beliau mengatakan:

"Program PNPM-MP dalam bidang kegiatan lingkungan bisa dikatakan sudah cukup tepat. Kami ingin membangun dan

memperbaiki semua jalan-jalan yang ada dalam usulan mau pun tidak dalam usulan tapi kembali lagi kami kesulitan untuk mengembangkan dana. Dalam pembangunan kami menggunakan dana APBD dan APBN. APBD pun itu dari tahun 2012 itu udah mengecil dari 40 % menjadi 10 %. Jadi kami kesulitan untuk mengembangkan dana yang terbatas itu.” (Wawancara, 15 September 2015).

Di Kelurahan Bangka Belitung Laut telah melaksanakan kegiatan lingkungan dalam PNMP-MP sudah cukup tepat. Meskipun pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kelurahan Bangka Belitung Laut tidak merata. Karena dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lingkungan seperti perbaikan infrastruktur, pihak BKM sangat sulit untuk menyesuaikan dana yang masuk ke rekening BKM. Sehingga dalam melaksanakan perbaikan dan pembangunan infrastruktur memilah-milah dan menyesuaikan dana yang tersedia. Pada tahun 2012 hanya ada 2 jenis kegiatan yang dapat implementasikan dari beberapa usulan-usulan kegiatan perbaikan.

2. Evaluasi PNPM-MP di Bidang Sosial

Komponen kegiatan di bidang sosial merupakan kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial

di masyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dan kerja sama. Untuk membahas berjalannya kegiatan dalam bidang sosial menggunakan kriteria evaluasi dunn adalah: Efisiensi PNPM-MP bidang sosial Di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Menurut Dunn (2003:430), efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Usaha apa saja yang dilakukan untuk sebuah program tersebut agar menghasilkan program yang efisien untuk masyarakat sebagai sasaran program. Untuk menilai efisiensi dari PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut menggunakan usaha-usaha apa yang dilakukan oleh pihak BKM dan UP-UP dalam melaksanakan kegiatan PNPM-MP.

Keefesiensian kegiatan sosial dapat dinilai dari terlaksananya kegiatan sosial di kelurahan tersebut. Untuk menunjang keberhasilan kegiatan sosial diperlukan beberapa usaha untuk mencapai hasil yang diinginkan dan diharapkan. Usaha yang dilakukan berupa melakukan kegiatan rapat koordinasi.

Berikut wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 September 2015 kepada

bapak "B" sebagai Koordinator BKM di Kelurahan Bangka Belitung Laut.

"Kalo kegiatan sosial itu tidak efisien. Karena kami menyesuaikan dana yang turun dari APBD itu kecil. Supaya kegiatan sosial itu bisa efisien kami perlu dana besar. Seperti pelatihan yang bisa dimanfaatkan sesudahnya contoh pelatihan satpam. Pelatihan satpam itu mahal sedangkan dana nya yang diberikan untuk kegiatan pelatihan hanya berjumlah Rp 3.000.000,-Jadi kami juga dalam membuat kegiatan pelatihan harus menyesuaikan dana itu sendiri. Kalo kami turutkan supaya efisien, dana itu tidak cukup."

Selanjutnya wawancara langsung yang penulis lakukan dengan Ibu "W" sebagai pengurus BKM Bangka Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:

"Kegiatan Sosial di Kelurahan Bangka Belitung Laut berbentuk untuk kegiatan pelatihan. Namun pada tahun 2012, kegiatan pelatihan tidak ada. Karena Selama beberapa tahun ada yang tidak mengadakan pelatihan. Ndag setiap tahun ada kegiatan pelatihan. Karena dilarikan ke dana bergulir." (Wawancara, 15september 2015).

Selain efisiensi, mengevaluasi PNPM-MP menggunakan kriteria responsivitas PNPM-MP bidang sosial.

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu program. Berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan dan program. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Komponen bidang sosial berbentuk kegiatan sosial merupakan kegiatan yang secara langsung mampu menumbuhkan kembali modal sosial dimasyarakat seperti terjalannya kembali budaya gotong royong, tolong menolong antar warga, integritas, etos kerja, kewirausahaan, dan kerja sama. Dalam hal ini responsivitas kegiatan PNPM-MP berkaitan dengan hasil kebijakan yang memuaskan kebutuhan bagi kelompok-kelompok dibidang kegiatan sosial.

Kegiatan sosial di Kelurahan Bangka Belitung Laut, secara umum kegiatannya berbentuk kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga miskin agar memiliki kemampuan memberdayakan potensi diri. Dalam meningkatkan keterampilan warga miskin dalam sasarannya adalah

kelompok-kelompok yang tergolong miskin. Agar kelompok-kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam memberdayakan dan mengembangkan potensi didalam diri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu "S" sebagai Unit Pelayanan Sosial BKM Bangka Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:

"Responsivitas atau tanggapan kelompok-kelompok kegiatan sosial cukup merespon. Namun ketika pelaksanaannya kegiatan pelatihan, kelompok-kelompok kegiatan sosial tersebut tidak memanfaatkan dengan ilmu atau pengalaman yang didapatkan dari kegiatan pelatihan. Sehingga pada tahun anggaran 2012 kegiatan pelatihan ditiadakan. Karena tujuan dari kegiatan pelatihan tidak memuaskan". (Wawancara, 22 september 2015).

3. Evaluasi PNPM-MP diBidang Ekonomi

Manfaat dari kegiatan ekonomi ialah sebagai pinjaman kepada KSM dan harus dikembalikan kepada UP. Untuk membahas dalam berjalannya pinjaman dana bergulir kegiatan bidang ekonomi menggunakan kriteria evaluasi dunn adalah:Kecukupan PNPM-MP bidang ekonomi. Istilah kecukupan menurut Dunn (2003:430) berkenaan dengan seberapa jauh suatu

tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dalam hal ini kecukupan kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut berkaitan dengan biaya atau dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan kegiatan PNPM-MP. Namun berdasarkan data lapangan kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut pada tahun 2012 tidak semuanya sesuai dengan rumusan strategi penanggulangan kemiskinan.

Komponen bidang ekonomi berupa kegiatan yang memberikan manfaat dan peningkatan pendapatan bagi individu atau keluarga maupun kelompok secara langsung. Sehingga bermanfaat langsung bagi peningkatan pendapatan keluarga miskin atau KSM. Dalam hal ini kriteria kecukupan kegiatan PNPM-MP berkaitan biaya atau dana yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dengan pencapaian hasil yang diharapkan dari kegiatan ekonomi. Manfaat dari kegiatan ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung Laut ialah sebagai pinjaman dana bergulir yang diberikan kepada kelompok-kelompok peminjam atau KSM dan harus dikembalikan kepada UPK. Kegiatan pinjaman dana bergulir ini bersifat berkelanjutan.

Setiap KSM terdiri dari 5 orang anggota dan mewakili setiap RT di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Untuk tahap awal, setiap KSM yang mengajukan pinjaman dana bergulir akan menerima pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UPK bagian dari BKM Bangka Belitung Laut Abadi. Berikut wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu "S" yang menjabat sebagai UPK di BKM Bangka Belitung Laut Abadi. Beliau mengatakan:

"Setiap kelompok-kelompok pinjaman dana bergulir hanya menerima 2.500.000 dan setiap bulannya harus mengembalikan 20% pinjaman. Jadi dalam 10 bulan, kami menerima pengembalian pinjaman dana bergulir berjumlah 3.000.000,-. itupun jika KSM pinjaman dana bergulir itu mengembalikan sesuai dengan tepat waktu". (Wawancara, 26 September 2015).

Bentuk strategi penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi mencakup meningkatkan pendapatan warga miskin. Dengan memberikan pinjaman bergulir dengan bunga rendah. KSM yang menggunakan pinjaman dana bergulir, setiap bulannya harus mengembalikan 20% dari pinjaman. Jika pengembalian peminjaman itu lancar dalam jangka waktu 10 bulan, maka dapat meminjam kembali diputaran kedua dengan mendapat kelipatan dari

pinjaman pertama. Tujuannya disini untuk memotivasi setiap KSM dapat berusaha dan semakin giat terhadap usaha yang ditekuninya. Dengan modal yang lebih besar usaha yang dimilikinya tersebut dapat semakin berkembang dan maju. Sehingga dapat menambah pendapatan perekonomian keluarga.

Selain kriteria kecukupan, untuk mengevaluasi PNPM-MP menggunakan kriteria ketepatan PNPM-MP bidang ekonomi di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Menurut Dunn ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan menilai sebuah program dapat menghasilkan sesuai yang diinginkan dan benar-benar berguna.

Setiap KSM terdiri dari 5 orang anggota dan mewakili setiap RT di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Berikut nama-nama KSM di Kelurahan Bangka Belitung Laut yaitu Multi Peduli, Mulia, Mandiri, Pelita Hati, Mahoni Abadi, Sehat, Sinar Abadi, Kasih, Mawar, Melati, Bunda, Mekar, Multi Peduli2, Teratai2, dan Bunda2. Dari 15 KSM tersebut ada 2 KSM yang fiktif yaitu Mekar dan Melati. Karena KSM tersebut merupakan kelompok yang bergabung pada tahun lalu. Sehingga dalam pembukuan pinjaman dana bergulir dua

KSM yang fiktif tersebut tetap menjadi anggota pinjaman dana bergulir. Berikut wawancara dengan Ibu “S” yang menjabat sebagai UPK di BKM Bangka Belitung Laut Abadi mengenai ketepatan pinjaman dana bergulir. Beliau mengatakan:

“Saya rase KSM di BBL ini menggunakan benar benar pinjaman dana bergulir ini untuk modal usaha. Namun, tahun 2012 Cuma ada 3 KSM yang baru masuk. Sisanya itu KSM-KSM yang lanjutan. Karena kondisi dananya juga memang ndag ada. Jadi begitu dapat nagih terkumpul untuk satu orang, baru bisa minjamkan. Sedangkan pada tahun 2011 ksm ksm itu banyak yang macet. Sehingga Kalo ada yang nyangkut nyangkut tuh yang buat ndag bisa mutarkan ke kelompok lain.(wawancara, 26 September 2015)

KSM KSM di Kelurahan Bangka Belitung Laut menggunakan dana pinjaman bergulir dengan yang ditentukan, yaitu untuk menjadikan modal awal berusaha. Karena kendala yang dihadapi oleh setiap KSM-KSM berbeda-beda sehingga mereka terkadang sulit untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dengang adanya KSM-KSM yang tidak lancar dalam pengembalian pinjaman menyebabkan setiap KSM yang lancar dan ingin melanjutkan pinjaman dana bergulir tetap menerima Rp. 2500.000,-.

Ketepatan penggunaan pinjaman bergulir bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan warga miskin atau KSM-KSM yang meminjam pinjaman dana bergulir sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Berikut pendistribusian pinjaman dana bergulir ke setiap KSM di BKM Bangka Belitung Laut Abadi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu “N”. Beliau mengatakan:

“Pinjaman dana bergulir sangat tepat, jika disiplin. Karena Saya dengar banyak KSM yang sering macet. Sehingga menghambat KSM lain untuk meminjam pinjaman dana bergulir. Untuk pendistribusiannya tetap sama dalam satu kelompok tetap menerima Rp. 2.500.000,-Sudah menjadi ketentuan baku di kelurahan Babel. Ini merata tapi untuk kemajuan KSM cenderung kurang karena makin banyak KSM yang mogok atau berlubang-lubang. Coba KSM yang lancar ditambah modalnya, setidaknya KSM tersebut bisa semakin maju.”(wawancara, 18 november 2015).

Adanya pinjaman dana bergulir bagi KSM di Kelurahan Bangka Belitung Laut dirasakan sudah tepat jika setiap KSM-KSM peminjam dana bergulir mengembalikannya tepat dan disiplin. Dalam pendistribusian pinjaman dana bergulir setiap KSM yang lancar tetap menerima Rp. 2.500.000,-

karena sudah menjadi ketentuan baku di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Tidak ada kemajuan bagi KSM yang lancar dan tidak dapat peningkatan pendapatan keluarga jika tidak ditambah pinjaman dana bergulir untuk modal usaha.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang lingkungan.

Dalam kriteria evaluasi efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang lingkungan yang berbentuk perbaikan infrastruktur sudah cukup efektif. Dengan adanya PNPM-MP ini sedikit banyak membantu pada tataran pemerintah kecamatan dan kelurahan. Karena di PNPM-MP kegiatan lingkungan yang bisa ditangani hanya dalam skala pembangunan yang dibutuhkan masyarakat dalam skala yang kecil.

2. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang sosial

Dalam kriteria evaluasi efesiensi program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan tidak efisien. Karena tidak setiap tahun diadakan kegiatan berbentuk pelatihan sehingga dana yang dianggarkan untuk kegiatan pelatihan diberikan ke kegiatan ekonomi yaitu pinjaman dana bergulir.

Responsivitas PNPM-MP dalam bidang sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan, tanggapan kelompok-kelompok kegiatan sosial cukup merespon. Namun ketika pelaksanaannya kegiatan pelatihan, kelompok-kelompok kegiatan sosial tersebut tidak memanfaatkan dengan ilmu atau pengalaman yang didapatkan dari kegiatan pelatihan.

3. Evaluasi PNPM-MP dalam bidang ekonomi.

Dalam kriteria evaluasi kecukupan Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang ekonomi yang berbentuk pinjaman dana bergulir dinilai sudah cukup karena memberikan pinjaman bergulir dengan bunga rendah.

Ketepatan Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan dalam bidang ekonomi yang berbentuk kegiatan pinjaman dana bergulir sudah cukup tepat jika tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi.

bergulir ini wajib dikembalikan dengan bunga sehingga semakin memberatkan bagi warga miskin.

b) Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan berkaitan dengan Evaluasi PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan komponen bidang sosial seharusnya dalam mengadakan kegiatan sosial yang berbentuk kegiatan pelatihan tidak serta merta hanya memikirkan pembiayaan saat kegiatan pelatihan dilaksanakan melainkan keberlanjutan manfaat dari kegiatan pelatihan tersebut agar berjalan dengan baik.
2. Berdasarkan komponen bidang ekonomi, seharusnya kegiatan bidang ekonomi berbentuk pinjaman dana bergulir. Dengan alasan dana tersebut dapat terpelihara dan berkelanjutan dan beranggapan dengan adanya pinjaman dana bergulir dapat membantu warga miskin. Namun menimbulkan adanya penambahan beban bagi warga miskin yang meminjam karena pinjaman dana

F. REFERENSI

1. Sumber Buku:

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Format-format kuantitatif dan kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press

Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik. Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

-----, 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo..

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Rifka Aditama

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono.2004. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Anggaran 2014.

---- . 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

----- . 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

----- . 2014. *Kebijakan publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

2. Perda dan Perwa:

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 12 tahun 2012 tentang penanggulangan Kemiskinan Di Kota Pontianak

Keputusan Walikota Pontianak No 31.1/Bappeda/Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP) PNPM-MP Kota Pontianak.

3. Sumber lain :

Tim Persiapan PNPM Mandiri Perkotaan. Desember 2007. Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008. Diakses pada 7 september 2015 dari <http://www.p2kp.org/>

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Februari 2015. Laporan Hasil Evaluasi



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : INTAN PUJI LESTARI
 NIM / Periode lulus : E01111082 / 3
 Tanggal Lulus : 7 JANUARI 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP/ ILMU ADMINISTRASI
 E-mail address/ HP : intan.puji.lestari @ / 0852 4516 9584
 yahoo.co.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika.....*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

EVALUASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KELURAHAN BANGKA
 BELITUNG LAUT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

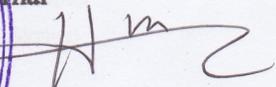
- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

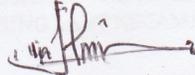
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

 H. Arifin M. A. B.
 NIP. 1971.05.02.1997.021.002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 29 Maret 2016


 INTAN PUJI LESTARI
 NIM. E01111082

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)